



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGUS DWITANTO
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 242668

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **950.500.000**

1. Tanah Seluas 1436 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 103.500.000
2. Tanah Seluas 389 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 25.500.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 525 m2/160 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HIBAH TANPA AKTA Rp. 258.000.000
4. Tanah Seluas 388 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 374.900.000
5. Tanah Seluas 524 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 188.600.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **280.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 59.000.000
4. MOBIL, PAJERO MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **----**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	11.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.241.500.000
III. HUTANG	Rp.	15.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.226.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.